



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUNAWAN SUMARSONO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. JEFFERDIAN, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

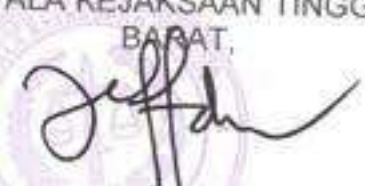
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 1 September 2025,

Pihak Kedua,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA
BARAT,


(Dr. JEFFERDIAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,


(GUNAWAN SUMARSONO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	85%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	90
		Nilai Kinerja Anggaran	95

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.582.686.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp19.536.406.000
Jumlah		Rp21.119.092.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Depok, 1 September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA
BARAT,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,


(Dr. JEFFERDIAN, S.H., M.H.)


(GUNAWAN SUMARSONO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUNAWAN SUMARSONO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. JEFFERDIAN, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 1 September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA
BARAT,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,


(Dr. JEFFERDIAN, S.H., M.H.)
(GUNAWAN SUMARSONO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	85%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	90
		Nilai Kinerja Anggaran	95

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.582.686.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp19.536.406.000
Jumlah		Rp21.119.092.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Depok, 1 September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA
BARAT,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,



(Dr. JEFFERDIAN, S.H., M.H.)



(GUNAWAN SUMARSONO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

FIRDAUS, S.H., M.H.)

(FIRDAUS, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 30,000,000,-
2	Layanan Sarana Internal	Rp. 205,000,000,-
3	Layanan Perkantoran	Rp. 19,301,406,000,-
Jumlah		Rp. 16,636,406,000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(FIRDAUS, S.H., M.H.)

(FIRDAUS, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Seiaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

PIH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK

PIH. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

FIRDAUS, S.H., M.H.)

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	95%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	96%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	96%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 24.700.000,-
2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 375.810.000,-
3	Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Upaya Hukum Dan Pelaksanaan Eksekusi Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20.000.000,-
4	Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 12.352.000,-
Jumlah		Rp. 432.862.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,



(R. RAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pt. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H., M.H.
Jabatan : Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,

Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(FIRDAUS, S.H., M.H.)

(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 92,082,000,-
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 208,000,000,-
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	Rp. 141,728,000,-
4	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah II	Rp. 11,080,000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



PIL. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

DEPOK

FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	75%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	75%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	75%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	12
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.800.000,-
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000,-
3	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 8.000.000,-
4	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 8.400.000,-
Jumlah		Rp. 58.400.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,



(PIRD AUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H.,M.H.

Jabatan : Ptl. KEPALA SEKSI INTELJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.

Jabatan : Pth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Pth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,

(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Ptl. KEPALA SEKSI INTELJEN,

(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H.,M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100 %
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100 %

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100 %
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	90%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100 %
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100 %
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	A

N o	Kegiatan	Anggaran
1	Pencairan Buron Tindak Pidana / DPO	Rp. 25,000,000
2	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40,000,000,-
3	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58,008,000,-
4	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 38,976,000,-
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 52,400,000,-
6	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20,000,000,-
Jumlah		Rp. 234,384,000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keenggolaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direksi/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,



(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pt. KEPALA SEKSI INTELLIJEN,

(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

DEPOK, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,


Kepala Kejaksaan Negeri
DEPOK
(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB.

(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	75%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 403,150,000,-
2		
3	Dst	
	Jumlah	Rp. 403,150,000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,



(ERDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RICHARD CHRISTOPHER MANURUNG, S.H., M.H.Li.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.
Jabatan : PIL. KEPALA SEKSI INTELJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

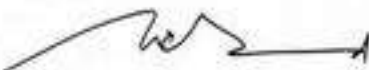
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,
PIL. KEPALA SEKSI INTELJEN,


(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI I,


(RICHARD CHRISTOPHER MANURUNG,
S.H., M.H.Li.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBSEKSI I

KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100 %
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100 %

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	kemasyarakatan		
3	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100 %
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100 %
5	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	A

N o	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pencarian DPO	Rp. 25.000.000,-
2	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000,-
3	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58.008.000,-
4	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 38.976.000,-
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 52.400.000,-
6	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20.000.000,-
Jumlah		Rp. 234.384.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

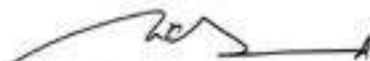
PIL. KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I,



(RICHARD CHRISTOPHER MANURUNG,
S.H., M.H.I.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DWI PRAKOSO, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H.,M.H.
Jabatan : Ptl. KEPALA SEKSI INTELJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Ptl. KEPALA SEKSI INTELJEN,

(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II,

(MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DWI
PRAKOSO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100 %
2	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pencarian DPO	Rp. 25.000.000,-
2	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000,-
3	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58.008.000,-
4	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 38.978.000,-
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 52.400.000,-
6	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20.000.000,-
	Jumlah	Rp. 234.384.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II,



(MUHAMMAD BASAS ANGGIT DWI
PRAKOSO, S.H.)

Pihak Kedua,

PIL. KEPALA SEKSI INTILIJEN,



(Dr. ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRADIPTA PRIHANTONO, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN
OPERASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.
Jabatan : Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI,

(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.)

(PRADIPTA PRIHANTONO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 92,082,000,-
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 206,000,000,-
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	Rp. 141,728,000,-
4	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah II	Rp. 11,080,000,-
Jumlah		Rp. 450,890,000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

PIL. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI,



(PRADIPTA PRIHANTONO, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR
BIASA DAN EKSEKUSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.
Jabatan : Ptl KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN
EKSEKUSI,

(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.)

(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyidikan Di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 92,082,000,-
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 206,000,000,-
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	Rp. 141,728,000,-
4	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah II	Rp. 11,080,000,-
Jumlah		Rp. 450,890,000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Untas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN
EKSEKUSI,



(DIMAS PRAJA SUBROTO, S.H.,M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYUSIDDHI TRIATMOJO, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA,

(WAHYUSIDDHI TRIATMOJO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	75%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	75%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	75%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.800.000,-
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000,-
3	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 6.000.000,-
4	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 8.400.000,-
	Jumlah	Rp. 56.400.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized oval loop followed by several horizontal strokes and a long, sweeping tail.

(WAHYUSIDDHI TRIATMOJO, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LATIFA DENTINA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Ptl. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN,

(LATIFA DENTINA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	95%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga	96%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Penuntutan	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewijsde</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	98%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 24,700,000,-
2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 375,810,000,-
3	Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Upaya Hukum Dan Pelaksanaan Eksekusi Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20,000,000,-
4	Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 12,352,000,-
Jumlah		Rp. 432,862,000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

PIL. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the top and a curved line extending to the right.

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized letter 'L' with a horizontal stroke across the middle.

(LATIFA DENTINA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROZZYANA NYNDHYA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM,

(ROZZYANA NYNDHYA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	12
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	A

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	tindakan hukum lain		

N o	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.800.000,-
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000,-
3	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 6.000.000,-
4	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 8.400.000,-
Jumlah		Rp. 56.400.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM,

(ROZZYANA NYNDHYA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TIARA ROBENA PANJAITAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN
EKSAMINASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : Ptl KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025.

Pihak Kedua,

PtL KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI,

(TIARA ROBENA PANJAITAN, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	95%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga	98%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Penuntutan	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusde zaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	96%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	A

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 24,700,000,-
2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 375,810,000,-
3	Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Upaya Hukum Dan Pelaksanaan Eksekusi Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20,000,000,-
4	Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 12,352,000,-
	Jumlah	Rp. 432,862,000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(TRI SUMARNI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' and 'P' followed by a long horizontal stroke.

(TIARA ROBENA PANJAITAN, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SUNKONO, S.H.
Jabatan : KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, DAN PNBP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK,

(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN, DAN PNBP,

(AGUS SUNKONO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Saranan Dan Prasarana Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
2	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	90%
		Nilai Kinerja Anggaran	95%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal: - Layanan Dukungan Manajemen Satker - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 30,000,000 Rp. 19,301,406,000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 205,000,000
	Jumlah	Rp. 19,536,406,000

D. KINERJA TAMBAHAN

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Formulasi	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dukungan Pembangunan Menuju Zona Integritas	Peningkatan Pelayanan Publik	90%

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK,

(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN, DAN PNBK,

(AGUS SUNKONO, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDRO SUSILO, A.Md.
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,

(ENDRO SUSILO, A.Md.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	A

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal: - Layanan Dukungan Manajemen Satker - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 30,000,000 Rp. 19,301,406,000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 205,000,000
	Jumlah	Rp. 19,536,406,000

D. KINERJA TAMBAHAN

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Formulasi	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dukungan Pembangunan Menuju Zona Integritas	Peningkatan Pelayanan Publik	90%

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,



(ENDRO SUSILO, A.Md.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RADEN ISPEBRIANTO, S.H.
Jabatan : KEPALA URUSAN TATA USAHA, PERPUSTAKAAN, DAN DASKRIMTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRDAUS, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA,
PERPUSTAKAAN, DAN DASKRIMTI,

(RADEN ISPEBRIANTO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DASKRIMTI, DAN PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	A

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal: - Layanan Dukungan Manajemen Satker - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 30,000,000 Rp. 19,301,406,000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 205,000,000
	Jumlah	Rp. 19,536,406,000

D. KINERJA TAMBAHAN

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Formulasi	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dukungan Pembangunan Menuju Zona Integritas	Peningkatan Pelayanan Publik	90%

Depok, 15 Agustus 2025

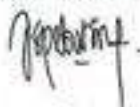
Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(FIRDAUS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA,
PERPUSTAKAAN, DAN DASKRIMTI,


(RADEN ISPEBRIANTO, S.H.)